

Kemitraan BUMN, Pemda, Pendidikan Tinggi, dan Masyarakat untuk Kesejahteraan Bangsa dalam Kerangka K-Economy

Oleh :

Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Wakil Rektor IV IPB

1. Pendahuluan

Sumbangsih terbesar dari Perguruan tinggi untuk pengembangan masyarakat adalah *knowledge*, berdasarkan hal tersebut dapat dikembangkan *knowledge based economy* atau disebut sebagai *K-economy*. Dalam kaitannya dengan *K-Economy*, IPB mempunyai konsep yang dikenal dengan ABG (*Academic, Bussiness, Government*) dan dalam perkembangannya menjadi ABCG (*Academic, Bussiness, Community, and Government*).

Kehidupan ekonomi di Indonesia saat ini hingga mendatang masih berbasis sumber daya (*resources based economy*). Sumber daya terbagi ke dalam dua kelompok yaitu *renewable resources* seperti pertanian, perkebunan, serta *non renewable resources*, merupakan sumber daya yang sewaktu-waktu akan habis tetapi perlu diusahakan agar tetap tidak hilang peranan dari lahan yang sudah tidak dijadikan tambang tetapi lahan tersebut dapat tetap produktif.

Metode pembangunan ekonomi sebaiknya berbasis *Knowledge (knowledge based economy)* walaupun ekonomi bertumpu pada bidang pertanian (*renewable resources*) tetapi digunakan *K-based* sehingga kemajuan petani akan meningkat.

2. K-Economy dan Kemitraan Stakeholder

K-economy adalah ekonomi yang mengedepankan penciptaan dan eksploitasi ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Definisi ini diperjelas oleh OECD (1996) yang menyatakan bahwa *K-economy* adalah hasil dari pengakuan terhadap peran ilmu pengetahuan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu diusahakan koordinasi berbagai *stakeholder* terkait sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Stakeholder dan *K-Economy* meliputi swasta dan BUMN, Universitas/Pendidikan Tinggi, Pemerintah/termasuk Pemerintah Daerah, dan masyarakat (*community*).

2.1. Swasta dan BUMN

BUMN memiliki tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility-CSR*) untuk mensejahterakan masyarakat. Pengertian CSR Dalam World Council for Sustainable Development, "*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*". Suatu usaha bukan hanya menguntungkan dan memberikan efek negatif bagi masyarakat sekitar, tetapi ada suatu tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan secara nasional.

CSR dibangun atas lima pilar yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan, yang terdiri dari :

1. *Building human capital*
2. *Strengthening economies*
3. *Assessing social cohesion*
4. *Encouraging good governance*
5. *Protecting the environment.*

Dalam perwujudan CSR, masing-masing tidak dapat dipisahkan dan perlu dikembangkan secara berkesinambungan karena CSR dilihat secara holistik.

Dalam Kepmen BUMN : KEP-23G/MBU/2003, dinyatakan BUMN wajib melaksanakan program kemitraan dan Program Bina Lingkungan (BL). Dana program kemitraan bersumber antara lain dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1-3%. Dana program BL bersumber dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1%. Dalam aplikasinya perlu disepakati bersama bagaimana dana dari penyisihan laba tersebut didistribusikan, baik melalui pemerintah kabupaten, kota atau provinsi atau LSM dan Perguruan Tinggi.

2.2. Universitas/Pendidikan Tinggi

Secara keseluruhan universitas memiliki kegiatan tri-dharma perguruan tinggi. Peran ini dapat ditunjukkan dengan penciptaan pengetahuan (*knowledge production*), yaitu pembentukan pengetahuan baru, misalnya universitas melakukan riset tentang

kerusakan lingkungan dan pemanfaatan pemanfaatan *non renewable resources* dengan teknologi bioremediasi. Sebelum dilakukan penanaman diberikan perlakuan tertentu yang ramah lingkungan tanpa menimbulkan efek buruk bagi lingkungan.

Bentuk kedua dari tri dharma perguruan tinggi adalah *knowledge transmission* yaitu mendidik dan membangun sumberdaya manusia. Kegiatan ini dapat dilakukan baik secara langsung di sekolah di perguruan tinggi maupun dengan pengembangan *soft skill* dalam masyarakat.

Bentuk pengabdian perguruan tinggi pada masyarakat juga bisa berupa transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), yaitu mendiseminasikan pengetahuan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah.

2.3. Pemerintah

Peran pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat adalah menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mampu menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membangun kepercayaan (*trust*), serta penghormatan terhadap hak-hak individu dan penghargaan terhadap hasil karya.

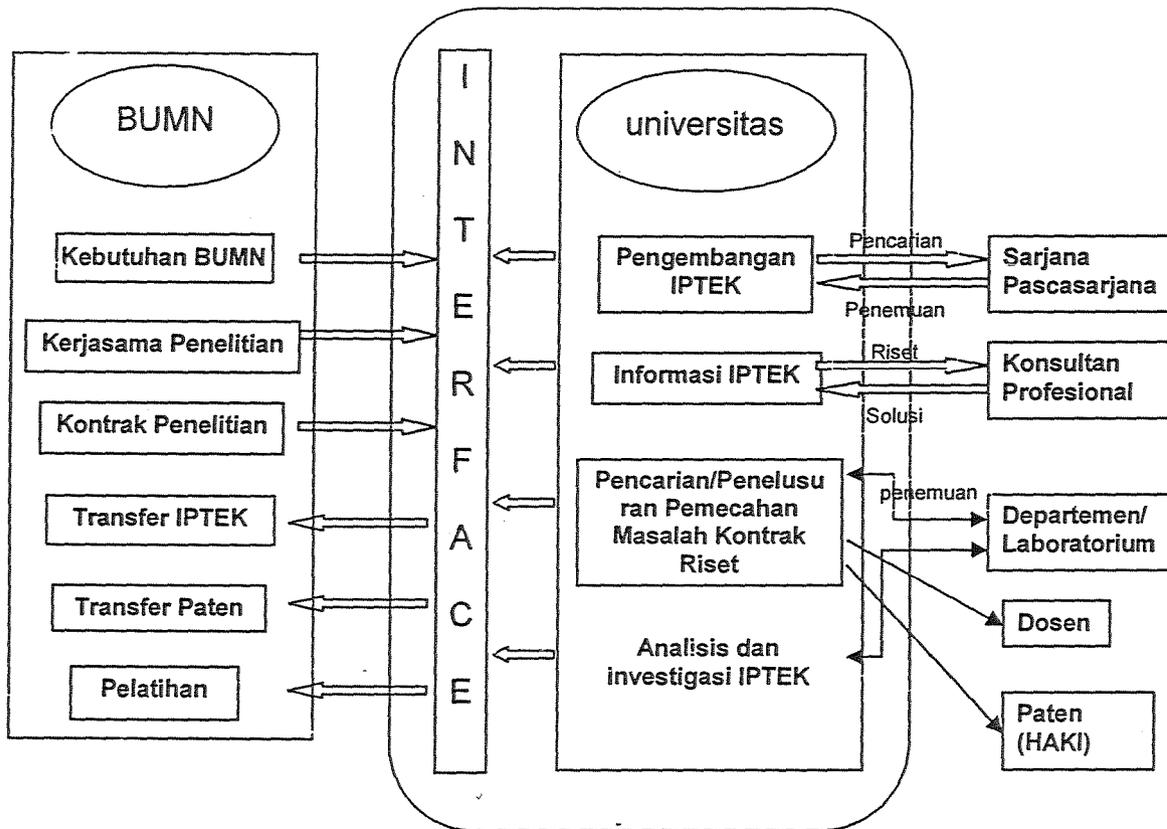
Pemerintah juga berkewajiban untuk menciptakan iklim berusaha yang baik dan memiliki langkah yang jelas untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Dalam masa otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi pelaku utama dan pemerintah pusat sebagai regulator. Mewujudkan pembangunan berbasis sumberdaya lokal (*local resources based development*) dapat diwujudkan dengan *renewable* maupun *non renewable resources*.

2.3. Masyarakat

Masyarakat merupakan pelaku utama dari *K-economy*. Sebagai pelaku utama diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berbasis pada ilmu pengetahuan (*knowledge based society k-society*), sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang menghargai makna kebebasan berpikir yang objektif, demokratis, sistematis, inovatif, dan toleran terhadap perbedaan.

Masyarakat juga hidup berkelompok dalam ikatan-ikatan kelembagaan formal maupun non formal yang dapat melakukan aktivitas sosial, ekonomi, dan lain-lain untuk mencapai hidup yang lebih baik.

Di semua lokasi BUMN dan perusahaan swasta selalu ada masyarakat yang seharusnya turut sejahtera dengan keberadaan perusahaan. Dengan sinergi model ABCG diharapkan BUMN, swasta, pemerintah memperoleh profit dan masyarakat sejahtera. Hubungan kerjasama BUMN dengan universitas digambarkan sbb :



Intercafe : International Center for Applied Finance and Economics

3. Penutup

Jika keempat unsur dapat melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan kapasitasnya, maka dapat tercipta kemitraan *stakeholder* untuk kesejahteraan bangsa. Pengembangan model ABCG dimana Universitas sebagai unsur *academic*, BUMN sebagai unsur *business*, Pemerintah Daerah yang merupakan unsur *government* dan masyarakat sebagai bentuk *community* berinteraksi dengan baik dapat terjadi sinergi peran untuk kesejahteraan bangsa.